

**RENCANA AKSI KINERJA**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target Kinerja				Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama				PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	Target	KETERANGAN			
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Langkah-langkah/aktivitas pencapaian target IKU	TW 1	TW 2	TW 3						TW 4		
1	2	3	4				5				6	7	8	9	10			
1	TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN BERKUALITAS	1 Nilai AKIP Perangkat Daerah	25%	50%	75%	100%	1	Melakukan monitoring berkala terhadap dokumen perencanaan (Renstra & Renja) agar selaras dengan target kinerja	25%	25%	25%	25%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1		
							2	Mengintegrasikan sistem pelaporan kinerja secara digital (e-Sakip).	25%	25%	25%	25%						
							3	Melaksanakan bimbingan teknis penyusunan Laporan Kinerja (LKJIP) bagi setiap unit kerja.	25%	25%	25%	25%						
													Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1			
													Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah PD yang diamankan	1			
													Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Umum PD	1			
													Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan kebutuhan barang milik daerah	1			

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target Kinerja				Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama					PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	Target	KETERANGAN	
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Langkah-langkah/aktivitas pencapaian target IKU	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4						
1	2	3	4				5					6	7	8	9	10	
													Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan perangkat daerah	1		
													Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	1		
2	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2 Opini BPK	15%	65%	100%		1	Percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLHP) tahun sebelumnya.	25%	25%	25%	25%	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2	
							2	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara penuh dan konsisten.	25%	25%	25%	25%					
							3	Penguatan peran Inspektorat dalam reviu laporan keuangan sebelum diserahkan ke BPK.	25%	25%	25%	25%			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2	
														Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	61		
														Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	61		
														Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	61		
														Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	61		
														Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2		
														Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2		
														Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2		
														Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kot	100		
													PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			
														Jumlah dokumen laporan pengelolaan kas daerah	444		
														Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	658		
														Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	200		

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target Kinerja				Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama				PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	Target	METERANGS	
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Langkah-langkah/aktivitas pencapaian target IKU	TW 1	TW 2	TW 3						TW 4
1	2	3	4				5				6	7	8	9	10	
												PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			
														Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	540	
														Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1	
														Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2	
														Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan	5	
														Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1	
														Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1	
														Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	125	
												PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12	
														Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	12	
														Jumlah laporan hasil pengelolaan dana bagi hasil kabupaten/kota	12	
												PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	17240	
												PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2	
														Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	41	
														Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2	
														Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	41	
														Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1	
														Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	
														Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	6	
														Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	41	
														Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1	

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target Kinerja				Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama				PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	Target	KETERANGAN	
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Langkah-langkah/aktivitas pencapaian target IKU	TW 1	TW 2	TW 3						TW 4
1																
		3 Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	15%	25%	65%	100%	1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi pajak/retribusi daerah.	25%	25%	25%	25%	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pembinaan pengelola BMD	70	
							2. Pemyederhanaan birokrasi perizinan untuk menarik investasi masuk ke daerah.	25%	25%	25%	25%			Jumlah dokumen Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	2	
							3. Optimalisasi pengelolaan aset daerah (pemanfaatan lahan/bangunan) untuk menambah pemasukan.	25%	25%	25%	25%					
1	MEJINGKATNYA KUALITAS INOVASI DAERAH	4 Nilai Kematangan Inovasi PD	15%	25%	65%	100%	1. Melakukan inventarisasi dan pendataan inisiatif inovasi di setiap unit kerja.	25%	25%	25%	25%	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	8	
							2. Melengkapi dokumen pendukung (evidence) seperti regulasi, SOP, dan profil inovasi secara digital.	25%	25%	25%	25%			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberitahuan Kebijakan Pajak Daerah	4	
							3. Melaksanakan uji coba inovasi minimal 6 bulan untuk memastikan stabilitas dan kemanfaatan sistem.	25%	25%	25%	25%			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1	
							4. Melakukan input data dan koordinasi aktif dengan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) atau Bappeda.	25%	25%	25%	25%			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	100	
													Jumlah Objek Pajak yang Dsesuaikan NJOP nya	5000		
													Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	30		
													Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	5.000		
													Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	175.000		
													Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	175		
													Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4		
													Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4		
													Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	4		

